

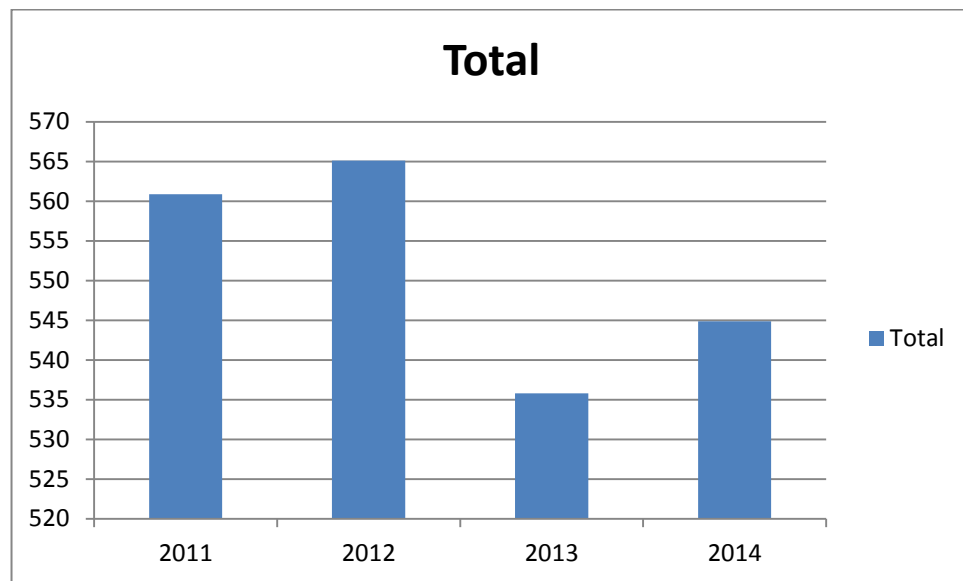
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia. Namun Indonesia bukanlah negara yang terbebas dari masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kriminalisasi. Masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia ini bukanlah suatu masalah yang harus kita hindari akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikan atau pengentaskannya.

Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami fluktuasi (naik dan turun). Pada periode September 2011 sampai dengan September 2012 cenderung mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin pada September 2011 tercatat sebesar 560,88 ribu sedangkan pada September 2012 mengalami kenaikan menjadi 565,10 ribu jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada periode 2012 sampai dengan 2013 mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode September 2013 tercatat sebesar 535,8 ribu penduduk. Sedangkan pada periode Maret 2014 cenderung mengalami kenaikan yaitu tercatat sebesar 544,86 penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fenomena kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut :

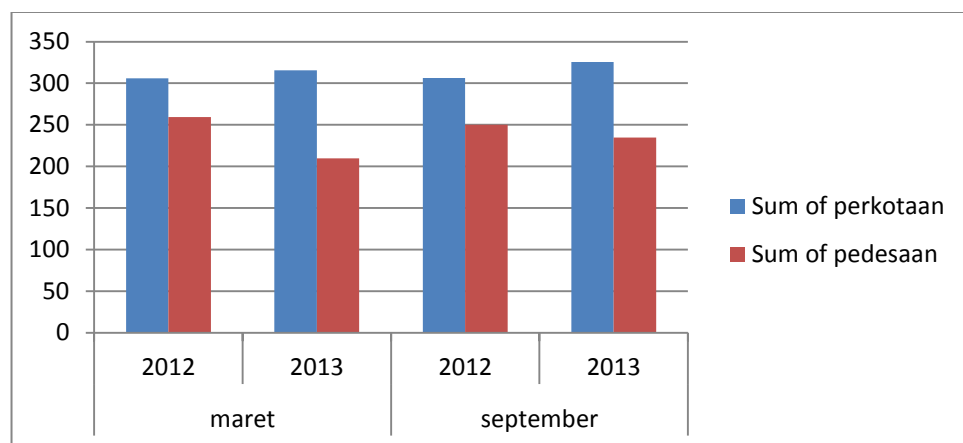


(Sumber : Badan Pusat Statistik,2014)

Hasil analisis terhadap peta kemiskinan di Indonesia setidaknya mengacu pada dua hal yaitu kemiskinan di pedesaan dan di perkotaan. Dalam sebuah negara berkembang, fenomena kemiskinan tidak hanya milik masyarakat pedesaan, yang sebagian besar diantara mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber perekonomian dan mengeksploitasi sumber daya alam. Akan tetapi juga milik masyarakat kota, terutama mereka yang tidak memiliki cukup ketrampilan untuk bersaing memasuki dunia kerja ataupun usaha (Latief,2010:6).

Berdasarkan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebar di berbagai daerah baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pada bulan Maret 2012 jumlah penduduk miskin perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar 305,90 ribu jiwa. Sedangkan pada bulan September 2012 mengalami peningkatan

yaitu sekitar 306,50 ribu, Sedangkan penduduk miskin di daerah pedesaan pada bulan Maret 2012 berkisar 259,40 ribu jiwa dan cenderung menurun pada bulan September 2012. Pada Maret 2013 jumlah penduduk miskin perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 315,47 dan cenderung naik pada bulan September 2013 yaitu berkisar 325,53 ribu penduduk. Sedangkan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan pada tahun 2013 mengalami penurunan. Pada bulan Maret 2013 berjumlah 209,66 ribu penduduk menurun hingga 234,73 pada bulan September 2013. Berdasarkan pada data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Fenomena kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut :



(Sumber : badan pusat statistik, 2014)

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta belum tuntas dalam mengatasi kemiskinan terbukti dengan peningkatnya angka kemiskinan di Daerah Istimewa

Yogyakarta tiap tahunnya. Hal ini bukanlah masalah yang harus pemerintah selesaikan sendiri. Melainkan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk saling tolong menolong dan menjadi rahmatan lil alamin untuk semua umat beragama dimana pun berada.

Selain masalah kemiskinan yang melanda di Indonesia ini. Adanya krisis ekonomi yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Dampak dari krisis global tersebut tidak hanya terjadi pada sektor keuangan saja tetapi juga merambah pada sektor riil. Kerugian dan kebangkrutan baik di industri keuangan maupun manufaktur terus terjadi, yang disusul dengan pemutusan kerja diseluruh dunia, untuk mengatasi hal ini pemerintah Indonesia mengambil sejumlah langkah kebijakan, baik kebijakan dalam sektor fisikal, moneter maupun perbankan namun sampai saat ini kebijakan-kebijakan tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan atau signifikan. (<http://www.bi.go.id/>)

Untuk mengatasi masalah kemiskinan pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa kebijakan-kebijakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang melanda Indonesia. Salah satu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan seperti program bantuan tunai langsung, pemberian subsidi pada minyak tanah dan gas. Sedangkan dalam bidang kesehatan pemerintah memberikan jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) dan dalam bidang pendidikan pemerintah sendiri telah menyiapkan beasiswa bagi anak bangsa berprestasi yang kurang mampu. Namun program-program tersebut belum berhasil mengurangi angka

kemiskinan di Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan uluran tangan dari masyarakat menengah ke atas untuk menyisihkan sebagian rizkinya kepada masyarakat miskin agar tercipta kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Salah satu bentuk dari kepedulian tersebut adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan Islam seperti zakat, infak shodaqoh dan wakaf (Ridwan, 2014 : 8).

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan salah satu potensi yang dimanfaatkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang sedang melanda bangsa Indonesia, karena dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar sehingga melalui instrument keagamaan yaitu zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial yang ada di masyarakat (Ghofur, 2010 : 8). Diharapkan dengan adanya zakat dapat membantu Indonesia dalam mengatasi masalah kemiskinan dan keterpurukan selama ini.

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi. Di mana zakat mengikis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial di mana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah menumpukan kekayaan dalam segelintir orang (Kartika, 2007 : 4). Apabila zakat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab

oleh umat islam maka zakat akan menjadi sumber dana tetap yang potensial, dengan demikian zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Negara ini.

Zakat sendiri merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan umat muslim yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam. Menurut Hafidhudin zakat merupakan ibadah amaliyah yang memiliki kedudukan paling penting dalam membangun masyarakat, jika dikelola dengan baik maka akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat (Hafidhudin, 2002 : 140). Zakat juga sebagai bentuk ibadah amaliyah yang menjurus ke aspek sosial untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Sehingga zakat memiliki fungsi secara vertical dan horizontal, tidak hanya sebagai wujud ketaatan pada Allah namun juga sebagai wujud kepedulian sosial untuk sesama (Darojat, 1993: 13). Zakat, Infaq, shodaqoh adalah bentuk kedermawanan yang diajarkan Islam pada umatnya. Sedangkan pernyataan zakat dalam Al Qur'an disebutkan sebanyak 82 kali salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang zakat adalah Qs At-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan manusia, praktek filantropi di Indonesia tidak hanya sebatas ziswaf (zakat infak, Sedekah dan wakaf) saja namun berkembang lebih luas lagi dan salah satu kegiatan filantropi yang masih baru adalah wakaf tunai. Wakaf mengandung suatu kemaslahatan yang tidak ditemukan dalam sedekah yang lain. Karena kebanyakan dari harta wakaf digunakan untuk jalan Allah, begitu juga dengan wakaf tunai atau wakaf produktif kemanfaatannya terus mengalir secara ekonomis sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang menerima wakaf (Furqon, 2013 : 61).

Ziswaf zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf merupakan instrumen fiskal Islam yang telah peranannya sangat penting di dalam perekonomian. Dana ziswaf yang telah terkumpul dalam jumlah cukup besar diperlukan system pengelolaan yang baik agar lebih terlihat jelas sasarannya dan manfaatnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya system pengelolaan yang meliputi penghimpunan dan pemberdayaannya, bahkan perhatian dari pemikir Islam tentang zakat sangat kecil (Raharjo, 1999: 459)

Untuk itu diperlukan solusi yaitu melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrument ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf). Saat ini di Indonesia sendiri sudah banyak berdirinya lembaga-lembaga yang menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah kemiskinan. Dalam bentuk pengelolaan, pendistribusian, dan pengembangan dana zakat, infak, dan sedekah seperti kegiatan filantropi Islam dan pengoptimalan Baitul Mal yang ada dilembaga-lembaga keuangan syariah seperti BMT (Latief, 2010: 9).

Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat dipercayai sebagai lembaga pengelola zakat masyarakat yang diharapkan bisa memberikan bantuan secara konsumtif maupun produktif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun meningkatkan usaha kecil para mustahik atau masyarakat menengah ke bawah (Hafidudin, 2002: 142)

Selain itu Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat, Baitul Mal Wa Tamwil juga menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat kecil. Dengan cara mengoptimalkan Baitul Mal dalam pengelolaan zakat. Salah satu Baitul Mal Wa Tamwil yang peduli dengan masalah sosial adalah BMT BIF. Kinerja BMT sesungguhnya mempunyai dua fungsi Baitul-Mal yang berarti mengarah pada pengumpulan dan pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf), sedangkan baitul Tamwil berfungsi sebagai usaha pengumpul dana dan penyalur dana profit. Untuk itu Peneliti tertarik melakukan penelitian di BMT BIF Bina Ikhsanul Fikri karena BMT BIF Bina Ikhsanul Fikri merupakan salah satu BMT besar di Yogyakarta yang sudah berdiri sejak tahun 1998 dan sudah memiliki 11 kantor cabang yaitu di Sleman, Pleret, Nitikan, Bugisan, Parang Tritis, Gunung Kidul, Demangan, Gamping, Brosot, Melati kulon dan Sleman Kota Bangsri.

Moto BMT BIF (Bina Ikhsanul Fikri) adalah Memberikan kontrobusi bagi lingkungan dalam kegiatan- kegiatan keagamaan dan sosial. Baitul Maal BMT BIF (Bina Ikhsanul Fikri) berperan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana pada usaha-usaha nonprofit, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah. Selama tahun 2014 baitul mal

Indonesia BMT BIF telah banyak berkarya untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Program-program ini dapat berjalan berkat kepercayaan dari muzaki dalam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah melalui baitul mal Indonesia BIF (Bina Ikhsanul Fikri).

Dengan adanya pengelolaan ziswaf (zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf) pada BMT BIF diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan di bidang ekonomi yang dapat menjadi lembaga pengelola ziswaf yang menyebarkan manfaat kepada masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Diantara manfaat yang diharapkan oleh BMT BIF adalah Pemberdayaan ekonomi rakyat, Pelayanan kesehatan gratis, Bantuan beasiswa pendidikan, dan lain-lain yang berorientasi pada kesejahteraan umat (Sumber: <http://bmt-bif.co.id>).

Berangkat dari masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Baitul Maal, untuk menjawab sudah optimalkah Baitul Maal BMT BIF (Bina Ikhsanul Fikri) dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZISWAF. Hal tersebut sangat berkaitan dengan peran BMT dalam membantu menyalurkan dana sosial kepada masyarakat Yogyakarta. Maka kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan wakaf) pada Baitul Maal Indonesia BMT BIF (Bina Ikhsanul Fikri).”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun permasalahannya dapat dirumuskan sebagai, berikut :

1. Bagaimana Peran Baitul Maal Indonesia BMT BIF (Bina Ikhsanul Fikri dalam pengelolaan dan pendistribusian ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)?
2. Bagaimana Strategi Baitul Maal Indonesia BMT BIF (Bina Ikhsanul Fikri dalam memaksimalkan pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)?
3. Bagaimanakah dampak penyaluran dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat?